



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Gresik



2
0
2
5



dpmptsp_gresikkab



DPMPTSP GRESIK



dpmptsp.gresikkab.go.id



DPMPTSP Kab Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan II tahun 2025. Rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua

pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Gresik, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Kabupaten Gresik



A.M Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Dalam hal ini Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUPA PPAS Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2024 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 050/30/437.74/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor : 050/01/437.74/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2024.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUPA PPAS, RKA PAPBD Tahun 2025 dan DPA PAPBD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
3. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan
4. Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya angka investasi** dengan indikator sasaran **“Pertumbuhan realisasi investasi”**. Pada tahun 2024 target APBD sebesar 8,50% di tengah tahun hasil rekomendasi SAKIP Kemenpan RB dirubah menjadi 41,99% (sama dengan atau lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023). Untuk realisasi sendiri sebesar 22,66% dengan capaian sebesar 53,97%. Realisasi investasi Kabupaten Gresik pada tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun masih tetap tertinggi se Jawa Timur. Total realisasi sendiri pada tahun 2024 sebesar 37,91 trilyun.

Pada tahun ini target pertumbuhan investasi sebesar 18,61%. Sampai dengan triwulan I 2025 ini realisasi investasi sebesar 6,28 trilyun atau sebesar 3,06% dengan rincian sebagai berikut :

PMDN	:	Rp. 2.439.588.488.290
PMA	:	Rp. 3.847.607.232.842 (240.475.452 US\$)
Total	:	Rp. 6.287.195.721.132

Realisasi investasi sampai saat ini untuk yang triwulan II belum dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM.

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan** dengan indikator sasaran **“Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”**. Pada tahun 2024 target SANGAT BAIK dan terealisasi SANGAT BAIK.

Pada tahun 2025 ini target Nilai SKM “SANGAT BAIK” dan realisasi pada triwulan I juga “SANGAT BAIK”

Tabel 2.1
Capaian Sasaran Tahun 2025 (s.d Triwulan I)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Realisasi 2025 (s.d Triwulan I)
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	18,61%	3,06%
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

2.2 Evaluasi Pendapatan (s.d Triwulan II)

2.2.1 Evaluasi Pendapatan (s.d Triwulan II)

Target retribusi yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik di tahun 2025 sebesar Rp. 74.640.000.000,-. Sesuai Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/511/437.71/2025 tanggal 2 Juni 2025, target retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tetap sebesar Rp. 74.640.000.000,- dan sampai dengan triwulan II tercapai sebesar Rp. 15.263.857.373,- atau sebesar 20,44% (sebagaimana rincian pada tabel berikut) :

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan s.d Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi 2025 (s.d triwulan II)	%	Realisasi 2024
4	PENDAPATAN	74.640.000.000	15.263.857.373	20,44	50.914.068.161,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.640.000.000	15.263.857.373	20,44	50.914.068.161,36
4.1.02	Retribusi Daerah	74.640.000.000	15.240.278.228	20,41	50.383.258.170,60
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	74.640.000.000	15.240.278.228	20,41	50.374.398.170,60
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	2.455.145.994,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	2.455.145.994,00
4.1.02.03.	Retribusi Persetujuan	70.000.000.000	12.431.125.778	17,75	42.933.619.726,60

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi 2025 (s.d triwulan II)	%	Realisasi 2024
07	Bangunan Gedung				
4.1.02.03.	Retribusi Persetujuan	70.000.000.000	12.431.125.778	17,75	42.933.619.726,60
07.0001	Bangunan Gedung				
4.1.02.03.	Retribusi Penggunaan	4.640.000.000	2.809.152.450	0,00	4.985.632.450,00
08	Tenaga Kerja Asing (TKA)				
4.1.02.03.	Retribusi Penggunaan	4.640.000.000	2.809.152.450	0,00	4.985.632.450,00
08.0001	Tenaga Kerja Asing (TKA)				
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	0	23.579.145	0,00	530.809.990,76
4.1.04.13.	Pendapatan Denda	0	23.579.145	0,00	196.527.576,76
03	Retribusi Daerah				
4.1.04.13.	Pendapatan Denda	0	23.579.145	0,00	196.527.576,76
03	Retribusi Perizinan Tertentu				
4.1.04.13.	Pendapatan Denda	0	0	0,00	188.945.518,76
03.0007	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan				
4.1.04.13.	Pendapatan Denda	0	23.579.145	0,00	7.582.058,00
03.0016	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung				
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0,00	334.282.414,00
4.1.04.14.	Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0,00	334.282.414,00
01	Pengadaan Barang/Jasa				
4.1.04.14.	Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0,00	334.282.414,00
01.0001	Pengadaan Barang/Jasa				

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel E.81 berikut :

Tabel 2.3 (E.81)
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		PD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01	Terwujudnya tertib administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	100%	52.497.774.680	100%	31.751.119.273	95%	13.577.541.505	17,40%	2.363.069.291	18,77%	2.548.075.983	136,17%	36.662.264.546	138,95%	69,84%	
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	18	950.359.310	7	558.354.054	3	43.360.100	-	1.132.800	-	14.511.200	8	573.998.054	44,44%	60,40%	
2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	284.999.897	6	195.768.144	1	26.682.550	-	0	-	11.189.400	6	206.957.544	60,00%	72,62%	
2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	148.634.354	3	310.926.690	-	0	-	0	-	0	-	310.926.690	100,00%	209,19%	

2.18.01.2.06.0006			Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	10	11.021.087	14	0	14	22.120.000	140,00%	200,71%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	26.155.622	10	0	13	2.000.000	65,00%	7,66%	
2.18.01.2.06.0009			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130	333.099.032	164	0	164	381.268.032	126,15%	114,46%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	492.287.155	130	0	135	1.507.300	51,92%	0,31%	
2.18.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1								
2.18.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	7.570.047.211	12	0	15	3.104.734.191	83,33%	41,01%	
			Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
2.18.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260	9.026.110	260	0	260	3.769.000	100,00%	41,76%	
			Jumlah pengiriman surat menyurat									

2.18.01.2.09.0010			Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	13	25	1.539.403.844	0	-	0	25	1.539.403.844	192,31%	72,96%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	26	448.126.507	75.719.340	4	75.719.340	30	523.845.847	230,77%	7,60%
2.18.01.2.09.0011			Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	5	9	107.494.600	0	-	0	6	107.494.600	120,00%	46,85%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	10	49.994.750	5.300.000	2	5.300.000	12	55.294.750	400,00%	5,87%
2.18.02	Meningkatnya angka Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	46,85	314,27%	897.873.090	5.770.500	0,00%	5.770.500	314,27%	897.873.090	6,71%	11,95%
2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12	4	387/686/550	2/623/800	-	2/623/800	4	320.809.100	33,33%	36,95%

2.18.03.2.01.0001		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	2	154.592.108	5	119.433.000	-	0	0	4	119.433.000	20,00%	77,26%
			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4	196.416.245	1	30.957.250	-	0	0	-	0	0,00%	0,00%
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	208.210.892	1	248.424.117	-	0	0	-	248.424.117	0,00%	119,31%
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	16	518.046.755	4	331.484.798	-	22.526.100	22.526.100	-	22.526.100	0,00%	4,35%
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	162.836.441	1	55.411.800	-	1.600.000	1.600.000	1	57.011.800	33,33%	35,01%
2.18.04	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	4.658.095.281	291,64%	1.838.850.950	96,48%	39.768.800	99.666.507	385,44%	1.754.286.175	513,92%	37,66%

2.18.03.2.02.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75	1	175.137.319	415.512.938	7	173.679.800	4	33.372.460	5	11.803.000	9	45.175.460	1	460.688.398	1,33%	263,04%
2.18.03.2.02.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1	1	1.570.000.000	23.633.917	5	16.500.000	1	964.500	-	0	1	964.500	1	24.598.417	1,33%	1,57%
2.18.05	Meningkatnya angka investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	101,12%	3.465.848.868	1.762.282.478	30%	99.702.800	61,93%	15.122.300	54,12%	18.669.300	116,14%	33.791.600	217,26%	1.364.167.978	724%	39,36%
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1037	362	3.465.848.868	1.762.282.478	152	99.702.800	20	15.122.300	0	18.669.300	20	33.791.600	382	1.364.167.978	14,56%	39,36%

Dari tabel diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada triwulan II 2025 mencapai 247,63%. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain :
 - Tingginya nilai investasi di Kabupaten Gresik yang disebabkan banyaknya investor yang masuk
 - Dengan adanya sistem online (OSS RBA) dan SICANTIK membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha dapat memproses izinnya sendiri secara online. Sehingga izin yang diterbitkan melalui sistem OSS pun menjadi banyak
 - Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan realisasi investasinya semakin tinggi dari tahun ke tahun
2. Capaian anggaran di triwulan II sebesar 35,03%. Capaian anggaran kurang dari 50% dikarenakan pelaksanaan MPP 2 (eks pasar ikan) di hold sehingga anggaran untuk MPP 2 (eks pasar ikan) akan dialihkan pada saat PAPBD 2025 untuk perbaikan-perbaikan di Mal Pelayanan Publik.

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan realisasi investasi	-	-	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%	31,70%	22,66%	5,53%	5,24%	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)	SANGAT BAIK (89,62)	SANGAT BAIK (89,69)	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	-

Pada Renstra 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai 2 target indikator sasaran yaitu *Pertumbuhan realisasi investasi* dan *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*. Capaian dan proyeksi indikator sasaran dapat dilihat pada tabel diatas.

Indikator yang pertama *Pertumbuhan realisasi investasi* dengan target 8,50% dan tercapai 22,66 % dengan nilai realisasi investasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2024

	2021	2022	2023	2024
PMA (US\$ Ribu)	581.652,90	1.730.695,90	2.071.274,30	1.747.160,50
PMDN (Rp.Juta)	8.271.422,70	6.751.577,80	6.685.921,80	11.701.323,00

Tabel 2.6
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,98 %	11,05%	370,81%
2022	2,89%	24,11%	834,26 %
2023	5,00%	31,70%	634,00%
2024	8,50%	22,66%	266,59%

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total realisasi investasi Kabupaten Gresik di tahun 2024 sebesar 37,91 trilyun atau 25,7% dari realisasi investasi Provinsi Jawa Timur sebesar 147,3 trilyun dan merupakan tertinggi se Jawa Timur. Investasi PMDN mendominasi sebesar 69,13 % dari total investasi di Kabupaten Gresik di tahun 2024.

Indikator yang kedua *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat* dengan target SANGAT BAIK dan tercapai SANGAT BAIK dengan survey sebesar 89,69. Penilaian survey kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan dilakukan melalui aplikasi SuKma- e Jatim.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan.

Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan APBD. Sedangkan fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, di tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melayani customer sebanyak 39.964 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin sesuai data penerbitan izin tahun 2024 sebagaimana terlampir :

Tabel 2.7
Penerbitan Izin Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No /	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
		NON OSS												
A	Site Plan	2	4	1	7	2	5	7	4	3	5	4	7	51
B	PBG	4	11	67	37	67	67	71	167	130	98	114	8	841
C	IMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	SLF	2	77	16	19	129	73	147	41	69	24	19	0	616
E	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	102	119	50	14	80	18	53	79	110	89	59	81	854
F	Data SKKLH Non Pemerintah	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	6
G	Data PKPLH Khusus Pemerintah	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
H	Data PKPLH Khusus Non Pemerintah	0	2	3	11	2	0	2	1	0	2	0	2	25
I	SIM Pasar	33	0	17	0	2	9	9	35	0	0	23	30	158
J	Izin Pendirian SMP	2	1	0	0	0	1	1	1	2	0	3	2	13
K	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

II	L	Dasar (SD) Izin Pendirian Satuan PAUD	2	5	5	3	5	1	0	3	8	1	4	6	43
	M	Data Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	2	12
	N	Izin Reklame Insidentil	1	1	7	8	14	13	3	3	1	9	15	31	106
	O	Reklame Permanen	20	7	6	9	16	8	14	24	4	21	2	12	143
	P	Reklame Tetap	67	9	27	52	3	12	72	15	6	45	2	44	354
	A	NIB	105	893	1113	4811	1438	1187	1449	1103	1066	1110	4422	1624	21271
	B	Izin	1	0	2	1	3	0	0	2	1	2	2	3	17
	C	Persyarat Dasar	1184	1041	1346	817	1681	33	1713	1306	1271	1335	659	390	12776
	D	Umku	61	69	98	27	62	0	0	0	3	1	3	3	327
	E	Sertifikat Standar	211	217	233	148	236	2	259	252	196	222	188	177	2341
Jumlah			2750	2456	2991	5967	3744	1429	3801	3036	2872	2970	5522	2422	39960

2.5 Isu-Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Beberapa isu – isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diantaranya :

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Salah satu perubahan signifikan adalah transfoamasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan beroperasi secara mandiri, tanpa campur tangan kepala daerah dalam proses tanda tangan untuk pengeluaran izin, yang semuanya akan berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi yang panjang. Selain mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik, hal ini juga menjadi tantangan bagi daerah untuk mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya

- manusia (SDM) yang memadai dalam mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut
2. Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai hinterland Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di Kawasan Indonesia Timur, sekaligus berfungsi sebagai pintu penghubung dengan dunia luar, baik di tingkat regional maupun internasional. Kondisi ini semakin menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik
 3. Penetapan JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP Nomor 71 Tahun 2021 merupakan Langkah strategis yang dapat mendorong para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Keberadaan KEK ini tidak hanya memberikan fasilitas akses yang lebih baik ke pasar global, baik melalui Pelabuhan maupun bandara, tetapi juga menawarkan berbagai insentif dan kemudahan dalam proses perizinan. Dengan demikian, JIPE diharapkan dapat menjadi magnet bagi investasi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
 4. PP Nomor 28 Tahun 2025 pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta berusaha, dimana penerbitan perizinan berusaha dan dokumen terkait dilakukan oleh Lembaga OSS. Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain adalah untuk melaksanakan amanat PP Nomor 28 Tahun 2025 secara maksimal, sehingga OSS dapat berfungsi dengan baik dan dipahami oleh investor/ pemohon yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 adalah kemudahan memperoleh izin. Dengan mengakses OSS, investor/pemohon izin akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP, API dan akses kepabeanan.

2.5.1 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Pemetaan Permasalahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Aspek	Permasalahan	Akar Masalah
Proses perizinan	Proses perizinan yang rumit	Prosedur yang panjang dan biaya tinggi menghambat investasi
	Kurangnya integrasi sistem OSS RBA	Belum terhubung dengan system lain di Kementerian/ Lembaga seperti KPP dari BPN
Isu di Pasar Modal	Kualitas IPO yang buruk	Banyak IPO dengan kualitas rendah menyulitkan investor ritel mendapatkan akses yang adil
Pengawasan dan Pelaporan	Minimnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM	Banyak pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan
Komunikasi dan Edukasi	Sosialisasi tentang OSS yang minim	Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem OSS dan investasi
Regulasi dan Kebijakan	Tumpang tindih regulasi sectoral	Minimnya koordinasi antar Lembaga

2.6 Review Terhadap Perubahan RKPD

Pada rancangan perubahan RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdapat 8 program dan

12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 14.793.777.811,07,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2.9 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.793.777.811,07	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.793.777.811,07	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.793.777.811,07	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.793.777.811,07	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	13.577.541.505,07	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	13.577.541.505,07	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	43.360.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	43.360.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	26.682.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	26.682.550	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	16.677.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	16.677.550	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	8.624.380.042,07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	8.624.380.042,07	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.609.133.459,07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.609.133.459,07	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	15.246.583	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	15.246.583	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	79.052.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	79.052.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	79.052.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	79.052.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	1.200.172.013	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	1.200.172.013	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	41.210.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	41.210.300	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	584.003.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	584.003.400	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	52.920.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	52.920.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.554.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.554.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	3.297.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	3.297.600	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	27.366.963	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	27.366.963	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	448.819.150	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	448.819.150	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	2.445.516.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	2.445.516.300	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.958.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.958.200	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	943.679.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemanfaatan Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	943.679.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.499.878.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.499.878.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	1.185.061.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	1.185.061.050	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.844.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.844.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	75.564.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	75.564.000	
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.268.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.268.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	40.290.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	40.290.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	1.001.580.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	1.001.580.700	
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	14.514.050	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	14.514.050	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23 %	189.177.757	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	189.177.757	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	56.852.800	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	56.852.800	
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000	
23	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	46.852.800	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	46.852.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an 2024	Pagu Indik atif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	132.324.957	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	132.324.957	
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	1 doku men	28.169.600	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	1 dokume n	28.169.600	
25	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhira n data potensi investasi	1 daera h	7.229.597	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhira n data potensi investasi	1 daerah	7.229.597	
26	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 doku men	96.925.760	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokume n	96.925.760	
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuha n Promosi Penanaman Modal	14%	224.768.407	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuha n Promosi Penanaman Modal	14%	224.768.407	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	224.768.407	Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	224.768.407	
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/K ota	1 doku men	221.768.407	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Din as Pen ana man Mod al dan PTS P	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/K ota	1 dokume n	221.768.407	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	3.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	660.979.892	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	660.979.892	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	660.979.892	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	660.979.892	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	33.598.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	33.598.400	
30	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	137.201.692	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	137.201.692	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 pelaku usaha	473.679.800	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 pelaku usaha	473.679.800	
32	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5 kegiatan usaha	16.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5 kegiatan usaha	16.500.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	129.702.800	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	129.702.800	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	129.702.800	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	129.702.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	11.091.200	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	11.091.200	
34	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 pelaku usaha	67.402.800	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 pelaku usaha	67.402.800	
35	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	51.208.800	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTS P	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	51.208.800	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	11.607.450	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	11.607.450	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	11.4607.450	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	11.4607.450	
36	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	11.607.450	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	11.607.450	

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.10 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				-
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				-
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Penanaman	Jumlah orang yang menerima	51	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASN	Modal dan PTSP	gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	-
12	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	-
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	-
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	-
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	-
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	-
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	39,04%	-
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	-
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	-
23	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	-
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
25	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	-
26	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	-
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	14%	-
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	-
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	-
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	-
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	-
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumrn	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	-
31	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 pelaku usaha	-
32	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 pelaku usaha	-
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	-
33	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	-
34	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 pelaku usaha	-
35	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	-
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	-
36	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk operasional Tim PBG (konsultan untuk rumah sederhana) dan beberapa pergeseran pada subkegiatan. Pergeseran yang dilakukan antara lain :

1. Anggaran pada subkegiatan *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Dukungan pelaksanaan Sistem PBE* pada SKPD digeser untuk subkegiatan *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* dikarenakan anggaran pada 3 subkegiatan yang bertambah tersebut diprediksikan sampai akhir tahun tidak cukup sehingga diambilkan dari subkegiatan lain
2. Anggaran pada subkegiatan *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik* digeser sebesar Rp. 30.000.000,- untuk subkegiatan *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha* karena akan digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendamping

Selain pergeseran anggaran, juga ada penyesuaian target kinerja dikarenakan pergeseran yang membuat anggaran berkurang. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini :

Table 2.8

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

No Rekening (1)	Usuran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator (4)	Target		Anggaran (Dalam Juta Rupiah)		Bertambah (Berkurang)
				Sebelum (5)	Sesudah (6)	Sebelum (7)	Sesudah (8)	
2.18	Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					14.793.777.811,07	14.793.777.811,07	-
2.18	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					14.793.777.811,07	14.793.777.811,07	-
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	95%	13.577.541.505,07	13.577.541.505,07	-
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	43.360.100	43.360.100	-
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	26.682.550	26.682.550	-
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	16.677.550	16.677.550	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	8.624.380.042,07	8.624.380.042,07	-
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/ bulan	51 orang/ bulan	8.609.133.459,07	8.609.133.459,07	-

2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	15.246.583	15.246.583	-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepagawain perangkat daerah	1 paket	1 paket	79.052.000	79.052.000	-
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	83 orang	79.052.000	79.052.000	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	1.233.016.313	1.200.172.013	(32.844.300)
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	41.210.300	41.210.300	-
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	609.894.400	584.003.400	(25.891.000)
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	53.801.300	52.920.000	-
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	42.554.600	42.554.600	-
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	5 dokumen	3.297.600	3.297.600	-
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	65 laporan	27.366.963	27.366.963	-

2.18.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	454.891.150	448.819.150	(6.072.000)
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	3 jasa	3 jasa	2.445.516.300	2.445.516.300	-
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.958.200	1.958.200	-
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	943.679.600	943.679.600	-
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.499.878.500	1.499.878.500	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	6 jenis	6 jenis	1.152.216.750	1.185.061.050	32.844.300
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	38.556.700	50.844.000	12.287.300
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	13 unit	13 unit	61.890.350	75.564.000	13.673.650
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	2.268.000	2.268.000	-
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	6 unit	40.290.300	40.290.300	-

2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	13 unit	1.001.580.700	1.001.580.700	-
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	7.630.700	14.514.050	6.883.350
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	39,04%	39,04%	189.177.757	189.177.757	-
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	1 draft	1 draft	56.852.800	56.852.800	-
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 dokumen	1 dokumen	46.852.800	46.852.800	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	2 draft/ kajian	132.324.957	132.324.957	-
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	28.169.600	28.169.600	-
2.18.02.2.02.0003	Penyusunan data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	1 daerah	7.229.597	7.229.597	-

2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	96.925.760	96.925.760	-
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	14%	224.768.407	224.768.407	-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	224.768.407	224.768.407	-
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	221.768.407	221.768.407	-
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	-
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	390.979.892	660.979.892	270.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	390.979.892	660.979.892	270.000.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumen	33.598.400	33.598.400	-
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	167.201.692	137.201.692	(30.000.000)

2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	7 pelaku usaha	173.679.800	473.679.800	300.000.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 kegiatan usaha	5 kegiatan usaha	16.500.000	16.500.000	-
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	30%	99.702.800	129.702.800	30.000.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	152 kali	99.702.800	129.702.800	30.000.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	11.091.200	11.091.200	-
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	360 pelaku usaha	37.402.800	67.402.800	30.000.000

2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Kegiatan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	51.208.800	51.208.800	-
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	5	11.607.450	11.607.450	-
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	3 jenis	11.607.450	11.607.450	-
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	11.607.450	11.607.450	-

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan tindaklanjut atas Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025

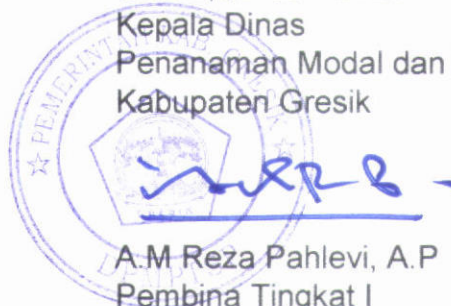
Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan terhadap hasil evaluasi atas Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sampai dengan periode triwulan I tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik khususnya dan adanya keselarasan serta kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,- dari anggaran semula Rp. 14.493.777.811,07 menjadi Rp. 14.793.777.811,07. Perubahan anggaran ini merupakan tambahan anggaran untuk operasional Tim PBG (jasa konsultasi untuk bangunan sederhana)

Gresik, 29 Juli 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



A.M Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1001